



DASAR – DASAR KEBIJAKAN PUBLIK

(Teori, Konsep & Praktik)

Restu Sasongko, Syahrabudin Husein Enala, Nur jalal,
Ida Ayu Putu Sri Widnyani, Frederikus Antonius Mana,
Dina Suryawati, Jalu Sora Wicitra, Yaen Miftakhul Laily,
Daelami Ahmad, Wydha Mustika Maharani,
Ida Ayu Githa Girindra, Imanuddin Hasbi.



DASAR – DASAR KEBIJAKAN PUBLIK

(Teori, Konsep & Praktik)

Restu Sasongko, Syahrabudin Husein Enala, Nur jalal,
Ida Ayu Putu Sri Widnyani, Frederikus Antonius Mana,
Dina Suryawati, Jalu Sora Wicitra, Yaen Miftakhul Laily,
Daelami Ahmad, Wydha Mustika Maharani,
Ida Ayu Githa Girindra, Imanuddin Hasbi.



DASAR-DASAR KEBIJAKAN PUBLIK (TEORI, KONSEP & PRAKTIK)

Tim Penulis:

**Restu Sasongko, Syahrabudin Husein Enala, Nur Jalal, Ida Ayu Putu Sri Widnyani,
Frederikus Antonius Mana, Dina Suryawati, Jalu Sora Wicitra, Yaen Miftakhul Laily,
Daelami Ahmad, Wydha Mustika Maharani, Ida Ayu Githa Girindra, Imanuddin Hasbi.**

Desain Cover:

Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Restu Sasongko

Proofreader:

Aas Masruroh

ISBN:

978-634-246-624-7

Cetakan Pertama:

Januari, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucapkan rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Teori, Konsep & Praktik)” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Teori, Konsep & Praktik).

Kebijakan publik merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menjadi instrumen utama dalam mengatasi berbagai permasalahan publik. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai teori, konsep, dan praktik kebijakan publik sangat diperlukan, baik bagi mahasiswa, akademisi, praktisi pemerintahan, maupun masyarakat umum yang memiliki ketertarikan terhadap isu-isu kebijakan. Buku ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan referensi yang membantu pembaca memahami proses perumusan, implementasi, serta evaluasi kebijakan publik secara sistematis dan kritis.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan *“tiada gading yang tidak retak”* dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PUBLIK	1
A. Definisi dan Ruang Lingkup Kebijakan Publik	2
B. Pentingnya Kebijakan Publik Dalam Kehidupan Masyarakat	4
C. Perbedaan Kebijakan Publik Dengan Hukum, Keputusan Politik, dan Regulasi	8
D. Peran Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Nasional	10
E. Rangkuman Materi	19
BAB 2 LANDASAN FILOSOFIS DAN TEORITIS KEBIJAKAN PUBLIK	25
A. Pendahuluan	26
B. Landasan Filosofis Kebijakan Publik	28
C. Teori-teori Dasar Kebijakan Publik	32
D. Prinsip-prinsip Kebijakan Publik	40
E. Hubungan Kebijakan Publik Dengan Disiplin Ilmu Lain	48
F. Rangkuman Materi	53
BAB 3 MODEL DAN PENDEKATAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK	59
A. Pendahuluan	60
B. Model Rasional	62
C. Model Inkremental	66
D. Model Sistem dan Kebijakan Adaptif	70
E. Pendekatan Interdisipliner Dalam Kebijakan Publik	75
F. Rangkuman Materi	79
BAB 4 LINGKUNGAN KEBIJAKAN PUBLIK	85
A. Pendahuluan	86
B. Lingkungan Politik	87
C. Lingkungan Ekonomi	89
D. Lingkungan Sosial dan Budaya	92
E. Lingkungan Global dan Teknologi	94
F. Rangkuman Materi	97

BAB 5 AKTOR DALAM KEBIJAKAN PUBLIK	101
A. Pendahuluan.....	102
B. Pemerintah Pusat dan Daerah.....	103
C. Lembaga Legislatif dan Yudikatif	106
D. Birokrasi.....	109
E. Masyarakat Sipil, Media, dan Sektor Swasta.....	113
F. Rangkuman	115
BAB 6 IDENTIFIKASI DAN FORMULASI MASALAH PUBLIK.....	121
A. Pendahuluan.....	122
B. Pengertian Masalah Publik	123
C. Identifikasi Isu Kebijakan	128
D. Agenda Setting.....	133
E. Formulasi Alternatif Kebijakan Publik	137
F. Rangkuman Materi	139
BAB 7 PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK.....	145
A. Pendahuluan.....	146
B. Teori Pengambilan Keputusan.....	146
C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam Birokrasi.....	152
D. Peran Politik Dalam Pengambilan Keputusan	155
E. Rangkuman Materi	163
BAB 8 KONSEP DAN MODEL IMPLEMENTASI	169
A. Pendahuluan	170
B. Konsep dan Model Implementasi.....	171
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi	175
D. Hambatan Implementasi Kebijakan	177
E. Strategi Efektivitas Implementasi.....	180
F. Rangkuman Materi	182
BAB 9 EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK.....	189
A. Pendahuluan.....	190
B. Tujuan Evaluasi Kebijakan	194
C. Metode dan Teknik Evaluasi.....	198
D. Indikator Keberhasilan dan Kegagalan	207
E. Studi Kasus Kebijakan	228
F. Rangkuman Materi	234

BAB 10 ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK	243
A. Pendahuluan	244
B. Fokus Perhatian dalam Analisis Kebijakan	245
C. Perbedaan Antara Analysis of Policy dan Analysis for Policy	253
D. Langkah-langkah dalam Melakukan Analisis Kebijakan	256
E. Tugas Pokok Analisis Kebijakan	257
F. Kemampuan Politis dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Kebijakan	257
G. Rangkuman Materi	257
BAB 11 KEBIJAKAN PUBLIK DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN	261
A. Pendahuluan	262
B. Prinsip Good Governance	262
C. Transparansi, Akuntabilitas, dan Integritas	265
D. Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik	268
E. Kolaborasi Multi-Aktor	272
F. Rangkuman Materi	275
BAB 12 KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA DAN PROSPEKNYA	279
A. Sejarah Perkembangan Kebijakan Publik di Indonesia	280
B. Kebijakan Strategis: Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan	281
C. Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	283
D. Masa Depan Kebijakan Publik: Tantangan dan Peluang	284
E. Rangkuman Materi	292
GLOSARIUM	297
PROFIL PENULIS	313

a



DASAR-DASAR KEBIJAKAN PUBLIK (TEORI, KONSEP & PRAKTIK)

BAB 1: RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PUBLIK

Dr. Restu Widyo Sasongko, S.Pd., M.Si.
Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN

BAB 1

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PUBLIK

A. DEFINISI DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PUBLIK

1) Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian keputusan yang dirumuskan dan dijalankan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Kebijakan ini mengatur pengelolaan dan distribusi sumber daya demi kepentingan publik, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. (Umara & Hasanah, 2020).

Dalam kajian kebijakan, terdapat dua perspektif utama yang saling melengkapi. Pertama, kebijakan sebagai proses yaitu rangkaian langkah mulai dari identifikasi masalah, pengembangan ide, konsultasi dengan pemangku kepentingan, hingga evaluasi pelaksanaan. Perspektif ini menekankan dinamika interaksi antaraktor seperti pemerintah dan masyarakat. Kedua, kebijakan sebagai produk yang mengacu pada hasil akhir proses tersebut berupa dokumen kebijakan atau peraturan yang diimplementasikan dan dapat diukur dampaknya (Manganti, 2023).

2) Ciri-ciri utama kebijakan publik

Ciri-ciri utama kebijakan publik merupakan elemen yang penting dalam memahami bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi. Berdasarkan informasi dari berbagai jurnal nasional, terdapat beberapa ciri yang perlu diangkat untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kebijakan publik di Indonesia di antaranya:

- a. **Normatif dan berorientasi tujuan:** Kebijakan dirancang untuk mencapai sasaran publik tertentu misalnya program penurunan gizi buruk di Papua yang ditujukan menurunkan prevalensi gizi buruk (Tambaip & Tjilen, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, S., Darwin, R., & Zalikha, S. (2020). "zikir gemilang" elite politik di banda aceh: wacana populis atau kebijakan publik?. JWP (Jurnal Wacana Politik), 5(1), 58. <https://doi.org/10.24198/jwp.v5i1.26548>
- Dilla, S., Bukhari, F., Julianto, M., & Kusnanto, A. (2023). Penerapan model seiru pada kasus covid-19 di jakarta. Milang Journal of Mathematics and Its Applications, 19(2), 81-95. <https://doi.org/10.29244/milang.19.2.81-95>
- Erizona, W., & Afrinaldi, A. (2025). LITERATUR REVIEW: INOVASI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK SEBAGAI KATALISATOR EFISIENSI DAN GOOD GOVERNANCE. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 422. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5364>
- Hakim, A. (2019). Analisis aktor yang berperan dan mempengaruhi implementasi kebijakan tata ruang : studi di kabupaten pandeglang. The Indonesian Journal of Public Administration (Ijpa), 5(1). <https://doi.org/10.52447/ijpa.v5i1.1647>
- Hanifah, Z., & Frinaldi, A. (2025). INOVASI BUDAYA ORGANISASI DI SEKTOR PUBLIK: STRATEGI ADAPTASI TERHADAP DISRUPSI DIGITAL. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 296. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5377>
- Harianti, I., Fahamsyah, E., & Sari, N. (2024). Pengaruh globalisasi terhadap perekonomian ditinjau dari hukum niaga. Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia, 9(6), 3326-3334. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i6.15439>
- Hermawan, D., Akbar, G., & Ulumudin, A. (2020). Pengaruh implementasi kebijakan reforma agraria terhadap manajemen redistribusi tanah dalam mewujudkan efektivitas nilai sertipikat tanah (studi kasus pada petani badega kabupaten garut). Jurnal Publik, 12(2), 1-13. <https://doi.org/10.52434/jp.v12i2.2>
- Hidayat, R., A., N., & Tamrin, S. (2022). Tingkat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan covid 19. Jurnal Neo Societal, 7(4), 208. <https://doi.org/10.52423/jns.v7i4.28071>

- Isnawati, I., Herdiana, D., & Mujtahid, I. (2022). Implementasi kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan (imb): studi di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten natuna. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(2).
<https://doi.org/10.36312/jime.v8i2.3289>
- Manganti, G. (2023). Analisis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik. *DeCive*, 3(11).
<https://doi.org/10.56393/decive.v3i11.2053>
- Nahar, L., Rusi, M., & Ujiantuti, E. (2020). Strategi pemerintah indonesia dalam membentuk opini publik terkait pemberlakuan psbb. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(9), 632-640.
<https://doi.org/10.46799/jst.v1i9.129>
- Natika, L., & Putri, G. N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Umum dan Barang di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 26. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v3i1.1077>
- Patarai, M. (2021). Desentralisasi kebijakan dalam otonomi daerah. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(11), 1406-1417.
<https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i11.237>
- Permatasari, P. and Koestoer, R. (2022). Pengelolaan sempadan danau di kawasan pertanian: ulasan bandingan polandia, tiongkok dan indonesia. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*, 139-158.
<https://doi.org/10.36813/jplb.6.3.139-158>
- Prafitri, N. (2023). Evaluasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Oleh Puskesmas Sebagai Street Level Bureaucracy di Masa Pandemi Covid-19. *PANDITA Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.61332/ijpa.v5i1.36>
- Ramadani, T. (2019). The implementation of public communication management policy at ministry of energy and mineral resources. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(1), 1-18.
<https://doi.org/10.24258/jba.v15i1.369>

- Ranama, A., Mulyanto, A., & Kurniawan, I. (2021). Komunikasi kebijakan publik dalam penggunaan aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (sp4n lapor) di kecamatan panongan kabupaten tangerang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 11(2), 78-86. <https://doi.org/10.33592/jiia.v11i2.2133>
- Rasya, H. and Triadi, I. (2024). Akses keadilan dan kesenjangan sosial: transformasi melalui peran hukum tata negara. *ijlj*, 1(4), 12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2330>
- Seftyono, C. (2018). Politik kebijakan publik: pengantar untuk mahasiswa dan peneliti pemula (draft).. <https://doi.org/10.31235/osf.io/qy6ns>
- Sirajuddin, I. (2016). Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan publik dasar bidang sosial di kota makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.26858/jiap.v4i1.1817>
- Suci, S., Cendekiawan, M., & Firmansyah, A. (2024). Berhasilkah implementasi pengadaan publik berkelanjutan di indonesia?. *Jurnalku*, 4(1), 36-49. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i1.644>
- Suroso, S. (2022). Kebijakan dalam penyediaan kecukupan biaya operasional pendidikan menengah. *inisiasi*, 121-130. <https://doi.org/10.59344/inisiasi.v11i2.52>
- Tambaip, B. and Tjilen, A. (2023). Analisis kebijakan publik dalam derajat kesehatan di papua. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 101. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i1.8232>
- Umara, Y. and Hasanah, M. (2020). Analisis peran pemerintah daerah menyangkut penyelenggaraan pembelajaran tatap muka. *Al-Irsyad*, 10(2). <https://doi.org/10.30829/al-irsyad.v10i2.8527>
- Zulfia, I., Endrawan, G., Rosika, C., Syamsi, S., & Frinaldi, A. (2023). Implementasi kebijakan inovasi daerah dalam peningkatan kinerja organisasi. *Kebijakan Jurnal Ilmu Administrasi*, (Vol. 14 No. 2, Juni 2023). <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i2.6666>



DASAR-DASAR KEBIJAKAN PUBLIK (TEORI, KONSEP & PRAKTIK)

BAB 2: LANDASAN FILOSOFIS DAN TEORITIS KEBIJAKAN PUBLIK

BAB 2

LANDASAN FILOSOFIS DAN TEORITIS KEBIJAKAN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan salah satu instrumen terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Melalui kebijakan publik, negara tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakatnya. Kebijakan publik menjadi sarana konkret bagi pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara, seperti keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Karena itu, memahami kebijakan publik tidak cukup hanya dari sisi prosedural atau teknis, melainkan juga dari sisi filosofis dan teoritis yang melandasinya.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang **landasan filosofis dan teoritis kebijakan publik**. Landasan filosofis memberikan fondasi nilai, moral, dan pandangan hidup yang menjadi arah dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, landasan teoritis membantu menjelaskan bagaimana kebijakan publik terbentuk, diterapkan, dan dievaluasi dalam sistem pemerintahan yang kompleks. Keduanya saling melengkapi: filsafat memberi arah normatif, sedangkan teori memberi kerangka analitis yang rasional dan sistematis.

Dalam konteks penyelenggaraan negara, landasan filosofis kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman etis yang menuntun pembuat kebijakan agar setiap keputusan yang diambil berpihak pada kepentingan umum. Filosofi kebijakan publik tidak hanya membahas “apa yang seharusnya dilakukan negara”, tetapi juga “mengapa” dan “untuk siapa” kebijakan itu dibuat. Pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut membantu menempatkan kebijakan publik dalam kerangka nilai keadilan, kemanusiaan, dan kebaikan bersama (*common good*). Melalui pemahaman filosofis, pembuat kebijakan diharapkan tidak terjebak dalam

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Berlin, I. (1969). *Two Concepts of Liberty*. Oxford University Press.
- Bentham, J. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. London: T. Payne.
- Brundtland Commission. (1987). *Our Common Future*. Oxford University Press.
- Buchanan, J. M., & Tullock, G. (1962). *The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Cochran, C. L., & Malone, E. F. (2014). *Public Policy: Perspectives and Choices* (5th ed.). Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.
- Cooper, T. L. (2006). *The Responsible Administrator: An Approach to Ethics for the Administrative Role* (5th ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
- Dunn, W. N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik* (Terj. Samodra Wibawa). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). New York: Routledge.
- Easton, D. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. New York: Wiley.
- Frederickson, H. G. (2010). *Social Equity and Public Administration: Origins, Developments, and Applications*. Armonk, NY: M.E. Sharpe.
- Locke, J. (1690). *Two Treatises of Government*. London: Awnsham Churchill.
- March, J. G., & Olsen, J. P. (1984). The new institutionalism: Organizational factors in political life. *American Political Science Review*, 78(3), 734–749.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Glenview, IL: Scott Foresman.
- Mill, J. S. (1863). *Utilitarianism*. London: Parker, Son, and Bourn.
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

- Simon, H. A. (1997). *Administrative Behavior* (4th ed.). New York: The Free Press.
- Subarsono, A. G. (2015). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thompson, D. F. (1985). The possibility of administrative ethics. *Public Administration Review*, 45(5), 555–561.
- Wahab, S. A. (2017). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Malang: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.



DASAR-DASAR KEBIJAKAN PUBLIK (TEORI, KONSEP & PRAKTIK)

BAB 3: MODEL DAN PENDEKATAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

BAB 3

MODEL DAN PENDEKATAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan hasil dari suatu proses yang kompleks, dinamis, dan multidimensional. Dalam praktiknya, kebijakan tidak hanya terbentuk melalui pertimbangan rasional semata, tetapi juga melalui interaksi antara berbagai aktor, institusi, nilai, serta faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang saling memengaruhi. Proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik selalu melibatkan dinamika kekuasaan, konflik kepentingan, negosiasi, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Karena itu, untuk memahami bagaimana kebijakan publik bekerja dalam kenyataan, dibutuhkan kerangka analisis yang komprehensif melalui penggunaan berbagai **model dan pendekatan kebijakan publik**.

Model kebijakan publik berfungsi sebagai alat konseptual yang membantu menjelaskan bagaimana keputusan publik dibuat, diimplementasikan, dan dinilai. Model ini memberikan struktur berpikir yang sistematis agar fenomena kebijakan yang rumit dapat dipahami secara lebih sederhana dan analitis. Sementara itu, pendekatan kebijakan publik memberikan **kerangka teoretis dan metodologis lintas disiplin** dalam memahami hubungan antara teori dan praktik, antara idealitas kebijakan dan realitas birokrasi. Melalui kombinasi keduanya, analisis kebijakan menjadi lebih tajam, tidak hanya menjelaskan *apa* yang terjadi, tetapi juga *mengapa* dan *bagaimana* kebijakan itu terbentuk.

Model-model kebijakan publik juga memiliki dimensi **normatif**, karena setiap model membawa asumsi dan nilai tertentu yang mencerminkan orientasi dalam pengambilan keputusan. Misalnya, model rasional menekankan efisiensi dan efektivitas sebagai ukuran keberhasilan kebijakan, sementara model inkremental menonjolkan aspek realitas

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anderson, J. E. (2014). *Public Policymaking* (8th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Braybrooke, D., & Lindblom, C. E. (1963). *A Strategy of Decision: Policy Evaluation as a Social Process*. New York: Free Press.
- Cooper, T. L. (2006). *The Responsible Administrator: An Approach to Ethics for the Administrative Role* (5th ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
- Dunn, W. N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik* (Terj. Samodra Wibawa). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). New York: Routledge.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy* (15th ed.). Boston: Pearson.
- Easton, D. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. New York: Wiley.
- Etzioni, A. (1967). Mixed-Scanning: A "Third" Approach to Decision-Making. *Public Administration Review*, 27(5), 385–392.
- Frederickson, H. G. (2010). *Social Equity and Public Administration: Origins, Developments, and Applications*. Armonk, NY: M.E. Sharpe.
- Lasswell, H. D. (1951). *The Policy Sciences*. Stanford: Stanford University Press.
- Lindblom, C. E. (1959). The Science of Muddling Through. *Public Administration Review*, 19(2), 79–88.
- March, J. G., & Olsen, J. P. (1984). The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life. *American Political Science Review*, 78(3), 734–749.
- Musgrave, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance*. New York: McGraw-Hill.
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Simon, H. A. (1947). *Administrative Behavior*. New York: The Free Press.
- Simon, H. A. (1997). *Administrative Behavior* (4th ed.). New York: The Free Press.

- Subarsono, A. G. (2015). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Walker, W. E., Haasnoot, M., & Kwakkel, J. H. (2001). *Adaptive Policies, Policy Analysis, and Policy Making*. Paris: OECD Publishing.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.



DASAR-DASAR KEBIJAKAN PUBLIK (TEORI, KONSEP & PRAKTIK)

BAB 4: LINGKUNGAN KEBIJAKAN PUBLIK

BAB 4

LINGKUNGAN KEBIJAKAN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Kebijakan publik tidak lahir dalam ruang hampa. Ia selalu dipengaruhi oleh berbagai kekuatan eksternal yang berkembang dalam suatu ekosistem sosial-politik. Dunn (2018) menekankan bahwa kebijakan publik merupakan respons pemerintah terhadap masalah-masalah publik yang dinamis, sehingga proses perumusannya dipengaruhi oleh kondisi politik, ekonomi, sosial-budaya, hingga perkembangan global dan teknologi. Dengan demikian, memahami lingkungan kebijakan publik menjadi penting agar keputusan yang diambil oleh negara bersifat adaptif, efektif, dan berkelanjutan. Widnyani (2025) menegaskan untuk menghasilkan kebijakan publik yang responsive perlu mempertimbangkan faktor lingkungan, karakteristik Masyarakat, proses pelaksanaan dan struktur kelembagaan. Demikian pula Leo Agustino (2012) Kebijakan publik pasti akan dibentuk dan membentuk lingkungan sekitarnya (social, politik, ekonomi, maupun budaya). Dalam Muchlis Hamdi (2013) secara umum lingkungan kebijakan dalam praktik pemerintahan di Indonesia dikenal dengan sebutan “asta-gatra”, kedelapan dimensi tersebut dibedakan menjadi dua kelompok yaitu bersifat fisik mencakup tiga unsur yaitu: letak geografis, kekayaan alam, dan jumlah penduduk. Sedangkan kelompok non-fisik dikenal dengan akronim “Ipoleksosbudhankam” yang mencakup lima aspek yaitu: ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan-keamanan nasional. Pendapat ahli di atas penulis rangkum dalam uraian berikut mengenai lingkungan politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan lingkungan global dan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2018). *Public policymaking* (9th ed.). Cengage Learning.
- Budiardjo, M. (2021). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia.
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society*. Wiley-Blackwell.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis* (6th ed.). Routledge.
- Dye, T. R. (2020). *Understanding public policy* (16th ed.). Pearson.
- Easton, D. (1965). *A systems analysis of political life*. Wiley.
- Heywood, A. (2019). *Politics* (5th ed.). Palgrave Macmillan.
- Kingdon, J. W. (2011). *Agendas, alternatives, and public policies* (2nd ed.). Longman.
- Lasswell, H. D. (1951). *The policy orientation*. Stanford University Press.
- Fukuyama, F. (2018). *Identity: Contemporary identity politics and the struggle for recognition*.
- Farrar, Straus and Giroux. Heywood, A. (2019). *Politics* (5th ed.). Palgrave.
- Leo Agustino (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of economics* (9th ed.). Cengage.
- Muchlis Hamdi (2013). *Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Partisipasi*. Ghalia Indonesia
- Pitana, I. G., & Putu, P. (2019). *Sosiologi pariwisata*. Andi.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*.
- Rosenau, J. N. (2003). *Globalization and governance*. Routledge.
- Samuelson, P., & Nordhaus, W. (2019). *Economics* (20th ed.). McGraw-Hill.
- Simon & Schuster. Samuelson, P., & Nordhaus, W. (2019). *Economics* (20th ed.). McGraw-Hill.
- Stiglitz, J. (2012). *The price of inequality*. W.W. Norton.
- Todaro, M., & Smith, S. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson.

United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. UN Publishing.

UNDP. (2022). *E-Government survey 2022*. United Nations.

Widnyani, Ida Ayu Putu Sri. (2025), *Transformasi Perencanaan Pembangunan Melalui Mekanisme Musyawarah Desa*. Deepublish.



DASAR-DASAR KEBIJAKAN PUBLIK (TEORI, KONSEP & PRAKTIK)

BAB 5: AKTOR DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

BAB 5

AKTOR DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Aktor dalam kebijakan publik merujuk pada individu atau kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan, pengambilan keputusan, serta implementasi kebijakan. Aktor-aktor ini dapat berasal dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, serta lembaga non-pemerintah. Masing-masing aktor membawa kepentingan, tujuan, dan sumber daya yang berbeda-beda, yang saling mempengaruhi jalannya kebijakan. Secara tradisional, pemerintah dianggap sebagai aktor utama dalam formulasi kebijakan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat keputusan politik dan mengatur kebijakan publik. Namun, dalam konteks pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan, peran aktor lainnya semakin diakui. Sektor swasta, seperti perusahaan dan industri, juga sering menjadi aktor penting karena pengaruh ekonomi dan investasi yang mereka miliki. Selain itu, masyarakat sipil, yang terdiri dari kelompok-kelompok kepentingan, LSM, dan individu yang terlibat dalam berbagai isu sosial, memainkan peran penting dalam memberikan masukan, mengawasi, dan mengkritisi kebijakan yang ada.

Keberagaman aktor ini menciptakan dinamika yang kompleks dalam proses perumusan kebijakan. Setiap aktor membawa perspektif dan kepentingan yang berbeda, yang seringkali bertentangan satu sama lain. Misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur yang melibatkan pemerintah dan sektor swasta bisa bertentangan dengan kepentingan masyarakat lokal yang khawatir dengan dampak lingkungan dan sosialnya. Dalam hal ini, interaksi antar aktor akan menciptakan proses tawar-menawar (*bargaining*) yang intens, di mana masing-masing pihak berusaha untuk memperoleh manfaat sesuai dengan kepentingan mereka. Lebih lanjut, teori jaringan kebijakan menjelaskan bahwa kebijakan publik bukan hanya hasil keputusan dari aktor tunggal, melainkan merupakan

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, S., & Suhardiman, C. (2024). Hubungan Antara Kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif dalam Konteks Politik Hukum di Indonesia. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 23(2), 82–85. <https://doi.org/10.xxxx/wacana.v23i2.1234>
- Dahyar Daraba, H. (2023). *Reformasi Birokrasi & Pelayanan Publik*. <https://www.globaleksekutifteknologi.co.id>
- Ikhwan, A., & Wardani, S. B. E. (2022). Oposisi Masyarakat Sipil Kontra Hegemoni Negara Melalui Media Sosial Youtube di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 4(1), 33–46. <https://doi.org/10.47650/jglp.v4i1.406>
- mujiyanto solichin. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi. *Jurnal Studi Islam*, 6(2), 148–178.
- Mujiyanto Solichin. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi. In *Religi: Jurnal Studi Islam* (Vol. 6, Issue 2, pp. 148–178). <http://jurnaldialektika.com>
- Naim, Y. K., Azuar, L. F., Pepriyani, HS, R. K. P., & Rekmya, S. Z. (2024). Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 23(2), 18–22. <https://doi.org/10.xxxx/ejournal.v23i2.6789>
- Navita, B., Putri, R. A., Zahra, J. A., Fredlyna, A. M., Tapiheru, S. L. S., & Hadji, K. (2025). Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora (JURRISH)*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.4329>
- Pasolong, H. (2021). *Kepemimpinan birokrasi*. 978–979. [http://repository.poliupg.ac.id/52/1/Kepimimpinan %282021%29 Gabungan.pdf](http://repository.poliupg.ac.id/52/1/Kepimimpinan%282021%29Gabungan.pdf)
- Putri, A. S. A. (2023). Kedudukan serta Fungsi DPR dalam Sistem Lembaga Legislatif. *MIMBAR*, 3(2), 2019. <https://doi.org/10.52166/MIMBAR.V3I2.2019>

- Setiyono, B. (2012). Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi. *Penerbit Nuansa Cendekia*, 1–327.
- Tampubolon, M., Simajuntak, N., & Silalahi, F. (2023). Konsep Good Governance. *Birokrasi & Good Governance*, 1–166.
- Triwidodo, A., Wijaya, F. H., Baidawi, A., Zurdi, A. F., Fadilla, R. R., Jannah, R. A. M., & Farma, R. (2024). Pengaruh Keterlibatan Masyarakat Sipil Dalam Mitigasi Korupsi . In *Hikamatzu Journal Of Multidisciplinary* (Vol. 2, Issue 1, pp. 294–307). <https://yasyahikamatzu.com/index.php/hjm/about>
- Yusriadi, Y. (2018). Reformasi Birokrasi Indonesia: Peluang dan Hambatan. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 8(2), 178. <https://doi.org/10.31289/jap.v8i2.1824>



DASAR-DASAR KEBIJAKAN PUBLIK (TEORI, KONSEP & PRAKTIK)

BAB 6: IDENTIFIKASI DAN FORMULASI MASALAH PUBLIK

Dr. Dina Suryawati, S.Sos, M.AP

Program Studi Ilmu Administrasi FISIP Universitas Jember

BAB 6

IDENTIFIKASI DAN FORMULASI MASALAH PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Pada setiap proses kebijakan publik, langkah awal yang paling krusial adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan merumuskan masalah publik secara tepat. Kebijakan publik pada hakikatnya merupakan respons pemerintah terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, sebelum suatu kebijakan dirancang, perlu ada pemahaman mendalam mengenai apa yang menjadi persoalan publik, siapa yang terdampak, serta bagaimana masalah tersebut muncul dan berkembang dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi. Identifikasi dan formulasi masalah publik menjadi fondasi bagi keseluruhan siklus kebijakan, karena kesalahan dalam tahap ini akan berimplikasi pada ketidaktepatan kebijakan yang dihasilkan.

Tahapan identifikasi masalah publik tidak sekadar mengamati fenomena sosial yang tampak, melainkan juga menelaah akar penyebab, aktor yang terlibat, dan nilai-nilai yang dipertarungkan di dalamnya. Pada kenyataannya, apa yang dianggap sebagai “masalah publik” sering kali merupakan hasil dari proses sosial dan politik, bukan semata-mata kondisi objektif. Suatu persoalan baru akan diakui sebagai masalah publik ketika ia memperoleh perhatian luas, menimbulkan tekanan politik, dan menuntut intervensi pemerintah.

Setelah masalah teridentifikasi, proses selanjutnya adalah formulasi masalah publik dan perumusan alternatif kebijakan. Pada tahap ini, analisis kebijakan dituntut untuk mengonversi isu publik ke dalam bentuk yang dapat dipecahkan secara rasional melalui kebijakan. Dengan demikian, bab ini akan membahas bagaimana masalah publik didefinisikan, bagaimana isu kebijakan diidentifikasi, bagaimana suatu isu masuk ke dalam agenda

DAFTAR PUSTAKA

- Ackoff, R. L. (1974). *Redesigning the future: A systems approach to societal problems*. John Wiley & Sons.
- Aguilar, F. J. (1967). *Scanning the business environment*. Macmillan.
- Anderson, J. E. (2014). *Public policymaking* (8th ed.). Cengage Learning.
- Cobb, R. W., & Elder, C. D. (1972). *Participation in American politics: The dynamics of agenda-building*. Allyn & Bacon.
- Daviter, F. (2024). Approaches to policy framing: deepening a conversation across perspectives. *Policy Sciences*, 57, 221–256. <https://doi.org/10.1007/s11077-024-09520-y>
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Dye, T. R. (1972). *Understanding public policy* (15th ed.). Pearson.
- Easton, D. (1965). *A systems analysis of political life*. John Wiley & Sons.
- El-Osman, R. (2023). Digital transformation and public policy: A framework for integration. *Government Information Quarterly*, 40(3), 101833. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101833>
- Goffman, E. (1974). *Frame analysis: An essay on the organization of experience*. Harvard University Press.
- Head, B. W. (2022). *Wicked problems in public policy*. Palgrave Macmillan.
- Howlett, M. (2019). Policy analytical capacity: The missing ingredient in policy analysis? *Policy and Society*, 38(1), 1-8. <https://doi.org/10.1080/14494035.2019.1580211>
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2020). *Studying public policy: Principles and processes* (4th ed.). Oxford University Press.
- Jones, C. O. (1970). *An introduction to the study of public policy*. Wadsworth.
- Kingdon, J. W. (1984). *Agendas, alternatives, and public policies*. Little, Brown.
- Kurniawan, R. C., & Widodo, T. (2022). Challenges of collaborative governance in public policy implementation in Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 1-10. <https://doi.org/10.31258/jkp.13.1.1-10>

- Lasswell, H. D. (1936). *Politics: Who gets what, when, and how*. McGraw-Hill.
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187. <https://doi.org/10.1086/267990>
- Merton, R. K. (1936). The unanticipated consequences of purposive social action. *American Sociological Review*, 1(6), 894–904. <https://doi.org/10.2307/2084615>
- Mill, J. S. (1859). *On liberty*. John W. Parker and Son.
- Mills, C. W. (1956). *The power elite*. Oxford University Press.
- Peters, B. G. (2021). *Advanced introduction to public policy*. Edward Elgar Publishing.
- Peters, B. G., & Pierre, J. (2020). The COVID-19 pandemic as a game changer for public administration and leadership? The need for robust governance responses to turbulent problems. *Public Management Review*, 23(1), 1–12. <https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1820274>
- Sabatier, P. A., & Jenkins-Smith, H. C. (Eds.). (1993). *Policy change and learning: An advocacy coalition approach*. Westview Press.
- Schön, D. A., & Rein, M. (1994). *Frame reflection: Toward the resolution of intractable policy controversies*. Basic Books.
- Senge, P. M. (1990). *The fifth discipline: The art & practice of the learning organization*. Doubleday.



DASAR-DASAR KEBIJAKAN PUBLIK (TEORI, KONSEP & PRAKTIK)

BAB 7: PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

BAB 7

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Pengambilan keputusan dalam kebijakan publik merupakan proses krusial yang menentukan arah dan efektivitas tindakan pemerintah dalam menyelesaikan isu-isu masyarakat. Dalam konteks Indonesia, di mana tantangan seperti ketimpangan ekonomi, bencana alam, dan pandemi sering memerlukan respons cepat, pemahaman teori pengambilan keputusan membantu menganalisis mengapa beberapa kebijakan berhasil sementara yang lain gagal. Instruksi khusus untuk pembahasan ini adalah fokus pada teori-teori utama yang relevan dengan praktik kebijakan, dengan penekanan pada aplikasi lokal seperti reformasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) atau penanganan COVID-19. Data terkini menunjukkan bahwa menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, sekitar 65% kebijakan publik di Indonesia dipengaruhi oleh faktor politik dan keterbatasan informasi, yang sering mengakibatkan pendekatan inkremental daripada rasional sempurna (BPS, 2024). Pembahasan ini akan mengeksplorasi teori-teori tersebut untuk memberikan wawasan bagi pembaca, termasuk mahasiswa dan praktisi kebijakan.

B. TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Teori Rasional (*Rational Choice Theory*)

Teori rasional mengasumsikan bahwa pengambil keputusan bertindak secara logis untuk memaksimalkan manfaat dengan mempertimbangkan semua alternatif yang tersedia. Prosesnya mencakup definisi masalah yang jelas, identifikasi kriteria, pembobotan alternatif, penilaian, dan pemilihan opsi optimal (Downs, 1957). Kelebihannya adalah kemampuan menerjemahkan tujuan menjadi aksi konkret dan menekankan analisis

DAFTAR PUSTAKA

- Bachrach, P., & Baratz, M. S. (1962). *Two faces of power*. American Political Science Review, 56(4), 947–952.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Laporan ekonomi Indonesia 2020*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Survei kebijakan publik nasional*. BPS.
- Baumgartner, F. R., & Jones, B. D. (1993). *Agendas and instability in American politics*. University of Chicago Press.
- Cohen, M. D., March, J. G., & Olsen, J. P. (1972). *A garbage can model of organizational choice*. Administrative Science Quarterly, 17(1), 1–25.
- Dahl, R. A. (1961). *Who governs? Democracy and power in an American city*. Yale University Press.
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., et al. (2020). *COVID-19 and ASEAN responses: Comparative policy analysis*. Progress in Disaster Science, 8, 100129. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100129>
- Djalante, R., Nurhidayah, L., Lassa, J., & Munajat, M. E. (2021). *Community adaptation and action during the emergency response phase: Case study of the 2018 Kerinci Volcano eruption, Indonesia*. International Journal of Disaster Risk Reduction, 55, 102096.
- Downs, A. (1957). *An economic theory of democracy*. Harper.
- Easton, D. (1965). *A systems analysis of political life*. Wiley.
- Esping-Andersen, G. (1990). *The three worlds of welfare capitalism*. Princeton University Press.
- Fenno, R. F. (1973). *Congressmen in committees*. Little, Brown.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Laporan penanganan COVID-19*. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Laporan program vaksinasi nasional*. Kemenkes RI.
- Kingdon, J. W. (1984). *Agendas, alternatives, and public policies*. Little, Brown.
- Lasswell, H. D. (1936). *Politics: Who gets what, when, how*. McGraw-Hill.

- Lindblom, C. E. (1959). *The science of "muddling through."* Public Administration Review, 19(2), 79–88.
<https://doi.org/10.2307/973677>
- Mahendradhata, Y., Trisnantoro, L., Listyadewi, S., Soewondo, P., Marthias, T., Harimurti, P., & Prawira, J. (2017). *The Republic of Indonesia health system review*. World Health Organization.
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). *The agenda-setting function of mass media*. Public Opinion Quarterly, 36*(2), 176–187.
- Nash, J. F. (1950). *Equilibrium points in N-person games*. Proceedings of the National Academy of Sciences, 36(1), 48–49.
- Nugraha, A. R., & Ahyani, H. (2021). *Garbage can model at COVID-19 countermeasures policy in Banten*. Jurnal Ilmiah Administrasi, 9(1), 1–10.
- Pemerintah Kota Semarang. (2018). *Laporan reformasi birokrasi Kota Semarang 2018*. Pemkot Semarang.
- Pemerintah Provinsi Banten. (2021). *Laporan model pengambilan keputusan COVID-19 Provinsi Banten*. Pemprov Banten.
- Pemerintah Kabupaten Badung. (2021). *Agenda setting kebijakan pariwisata new normal Kabupaten Badung*. Pemkab Badung.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2020). *Analisis kebijakan PSBB DKI Jakarta tahun 2020*. BPBD DKI Jakarta.
- Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform*. Cambridge University Press.
- Shirai, S. (2004). *Post-crisis economic reform in Indonesia: Policy for intervening in ownership in historical perspective*. IDE Discussion Paper, 4.
- Simon, H. A. (1955). *A behavioral model of rational choice*. The Quarterly Journal of Economics, 69(1), 99–118.
<https://doi.org/10.2307/1884852>
- Simon, H. A. (1957). *Administrative behavior*. Macmillan.
- Simon, H. A. (1972). *Theories of bounded rationality*. In C. B. McGuire & R. Radner (Eds.), *Decision and organization*. North-Holland.
- Siregar, R. (2015). *Review on fuel subsidies reform of Joko Widodo's government*. GraSPP Working Paper Series.

- Siregar, R., & Wahid, A. (2016). *Fossil fuel subsidy reform: Lessons from the Indonesian case*. IDDRI Study, 6.
- Sutikno, B., Kusumawardani, N., Pasaribu, D., Arimbi, S. D., Syafitri, U. D., Trisyanti, D., & Suciati, T. (2021). *Policy formulation during pandemic COVID-19: A new evidence of multiple streams theory from Yogyakarta, Indonesia*. *Journal of Public Administration and Governance*, 11(3), 72–85.
- Sutopo, B. (2025). *State expenditure or political agenda? A critical analysis of APBN priorities at the onset of a new government*. ResearchGate Preprint.
- Weber, M. (1947). *The theory of social and economic organization*. Free Press.
- Wildavsky, A. (1964). *The politics of the budgetary process*. Little, Brown.
- World Bank. (2014). *Indonesia: Avoiding the trap – Development policy review 2014*. World Bank.
- World Bank. (2021). *Indonesia national health insurance (JKN) reforms and results program*. World Bank Documents.



DASAR-DASAR KEBIJAKAN PUBLIK (TEORI, KONSEP & PRAKTIK)

BAB 8: KONSEP DAN MODEL IMPLEMENTASI

BAB 8

KONSEP DAN MODEL IMPLEMENTASI

A. PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahap kritis dalam siklus kebijakan yang menghubungkan antara keputusan politik dan hasil yang nyata di lapangan. Proses ini melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, serta melibatkan masyarakat sebagai penerima langsung dampak kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada seberapa baik kebijakan tersebut diterjemahkan dalam bentuk program-program konkret yang dapat dijalankan oleh berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang implementasi kebijakan menjadi penting untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya.

Buku ini akan membahas secara komprehensif berbagai elemen yang memengaruhi implementasi kebijakan publik. Bab pertama akan menjelaskan tentang konsep dasar dan berbagai model implementasi yang ada, yang menjadi acuan dalam proses penerapan kebijakan. Selanjutnya, buku ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi, seperti kepemimpinan, kapasitas administrasi, koordinasi antar lembaga, serta keterlibatan masyarakat dan sektor swasta. Di bagian berikutnya, hambatan-hambatan yang sering kali menghambat kelancaran implementasi kebijakan, baik dari sisi teknis, sosial, maupun politik, akan dibahas secara mendalam. Terakhir, buku ini akan mengulas strategi-strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, termasuk perbaikan sistem pengawasan, penguatan kapasitas instansi pemerintah, dan pentingnya komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuya, B., Admassu, K., Ngware, M., Onsomu, E., & Oketch, M. (2015). Free primary education and implementation in Kenya. *Sage Open*, 5(1). <https://doi.org/10.1177/2158244015571488>
- Arar, K. (2021). Research on refugees' pathways to higher education since 2010: a systematic review. *Review of Education*, 9(3). <https://doi.org/10.1002/rev3.3303>
- Baider, F. and Karpava, S. (2023). From family to university: best practices for inclusive tertiary education. *Glottodidactica an International Journal of Applied Linguistics*, 50(1), 29-53. <https://doi.org/10.14746/gj.2023.50.1.3>
- Cai, C., Li, Y., & Tang, N. (2022). Politicalized empowered learning and complex policy implementation: targeted poverty alleviation in China's county governments. *Social Policy and Administration*, 56(5), 757-774. <https://doi.org/10.1111/spol.12802>
- Cheng, Y., Wang, B., Yang, B., & Tan, R. (2021). Monocular 3d multi-person pose estimation by integrating top-down and bottom-up networks.. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2104.01797>
- Fan, Y. and Yang, H. (2018). How is public housing policy implemented in China? a tentative analysis of the local implementation of four major programs. *The American Review of Public Administration*, 49(3), 372-385. <https://doi.org/10.1177/0275074018761807>
- Green, J. and Koebele, E. (2024). Coordinating school improvement: understanding the impact of state implementation approach on coordination in multilevel governance systems. *Review of Policy Research*, 42(2), 188-211. <https://doi.org/10.1111/ropr.12612>
- Greenhalgh, T., Robert, G., Macfarlane, F., Bate, P., & Kyriakidou, O. (2004). Diffusion of innovations in service organizations: systematic review and recommendations. *Milbank Quarterly*, 82(4), 581-629. <https://doi.org/10.1111/j.0887-378x.2004.00325.x>
- Hassel, A. and Wegrich, K. (2022). How to implement public policy., 127-158. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198747000.003.0005>

- Haycock-Stuart, E. and Kean, S. (2013). Shifting the balance of care? a qualitative study of policy implementation in community nursing. *Journal of Nursing Management*, 21(6), 867-877. <https://doi.org/10.1111/jonm.12088>
- Haycock-Stuart, E. and Kean, S. (2013). Shifting the balance of care? a qualitative study of policy implementation in community nursing. *Journal of Nursing Management*, 21(6), 867-877. <https://doi.org/10.1111/jonm.12088>
- Hu, P. and Ramanan, D. (2016). Bottom-up and top-down reasoning with hierarchical rectified gaussians., 5600-5609. <https://doi.org/10.1109/cvpr.2016.604>
- Hutagalung, F. and Kurnani, T. (2021). Comparative analysis of three implementation model of policies: case study in acid mine drainage management policy in indonesia. *E3s Web of Conferences*, 249, 02006. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124902006>
- Jiang, M. (2022). How public policies are implemented: a comparison of urban domestic waste classification policy implementation models. *Sustainability*, 14(22), 15480. <https://doi.org/10.3390/su142215480>
- Koontz, T. and Newig, J. (2014). From planning to implementation: top-down and bottom-up approaches for collaborative watershed management. *Policy Studies Journal*, 42(3), 416-442. <https://doi.org/10.1111/psj.12067>
- Kuo, P., Makris, D., & Nebel, J. (2011). Integration of bottom-up/top-down approaches for 2d pose estimation using probabilistic gaussian modelling. *Computer Vision and Image Understanding*, 115(2), 242-255. <https://doi.org/10.1016/j.cviu.2010.09.001>
- McTigue, C., Rye, T., & Monios, J. (2018). The role of reporting mechanisms in transport policy implementation by local authorities in england. *Case Studies on Transport Policy*, 6(3), 319-328. <https://doi.org/10.1016/j.cstp.2017.12.002>
- O'Toole, L. (2000). Research on policy implementation: assessment and prospects. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 10(2), 263-288. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a024270>

- Oloo, S. (2022). A case for a bottom-up approach in the implementation of health policy in africa. *Future Healthcare Journal*, 9, S13. <https://doi.org/10.7861/fhj.9-2-s13>
- Ryan, N. (1996). Some advantages of an integrated approach to implementation analysis: a study of australian industry policy. *Public Administration*, 74(4), 737-753. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1996.tb00893.x>
- Schofield, J. and Sausman, C. (2004). Symposium on implementing public policy: learning from theory and practice. *Public Administration*, 82(2), 235-248. <https://doi.org/10.1111/j.0033-3298.2004.00392.x>
- Shahi, H. (2024). Significance of bottom-up approach for policy implementation. *PAAN J.*, 30(1), 1748-1752. <https://doi.org/10.3126/paanj.v30i1.66101>
- Singh, J., Kumar, M., Sharma, A., Pandey, G., Chae, K., & Lee, S. (2020). Bottom-up and top-down approaches for mgo.. <https://doi.org/10.5772/intechopen.91182>
- Sirovátka, T., Horák, P., & Hořáková, M. (2007). Emergence of new modes of governance in activation policies: czech experience. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 27(7/8), 311-323. <https://doi.org/10.1108/01443330710773881>
- Towalu, H. (2022). Implementation of public policy. *Journal Research of Social Science Economics and Management*, 2(1). <https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i1.246>
- Viswanathan, M., Sridharan, S., Ritchie, R., Venugopal, S., & Jung, K. (2012). Marketing interactions in subsistence marketplaces: a bottom-up approach to designing public policy. *Journal of Public Policy & Marketing*, 31(2), 159-177. <https://doi.org/10.1509/jppm.11.049>
- Volodymyr, V. (2020). Effective public-private partnership models and their application in public policy implementation. *International Journal of Economics and Business Administration*, VIII(Special Issue 1), 239-247. <https://doi.org/10.35808/ijeba/545>

- Westhuizen, H., Giddy, J., Coetzee, R., Makanda, G., Tisile, P., Galloway, M., ... & Nathavitharana, R. (2024). Strengthening accountability for tuberculosis policy implementation in south africa: perspectives from policymakers, civil society, and communities. *BMC Global and Public Health*, 2(1). <https://doi.org/10.1186/s44263-024-00077-y>
- Yarbrough, C. (2016). Plan generosity in health insurance exchanges: what the affordable care act can teach us about top-down versus bottom-up policy implementation. *Journal of Public Policy*, 37(1), 55-83. <https://doi.org/10.1017/s0143814x16000015>



DASAR-DASAR KEBIJAKAN PUBLIK (TEORI, KONSEP & PRAKTIK)

BAB 9: EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

Daelami Ahmad, S.Ag, M.Si

Institut Kemandirian Nusantara (IKNUS) Pandeglang - Banten

BAB 9

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Evaluasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan paling penting dalam keseluruhan siklus kebijakan publik. Ia berfungsi sebagai sarana refleksi dan pembelajaran bagi pemerintah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan benar-benar menjawab masalah publik yang menjadi sasaran awalnya. Tanpa evaluasi yang sistematis, kebijakan publik akan berpotensi berjalan tanpa arah, tidak efisien dalam penggunaan sumber daya, dan gagal menghasilkan dampak sosial yang diharapkan (Dunn, 2018; Vedung, 2021).

Dalam literatur klasik administrasi publik, evaluasi sering disebut sebagai fase “umpan balik” (*feedback phase*) dalam *policy cycle* (Howlett & Ramesh, 2021). Melalui evaluasi, kebijakan publik dapat dinilai apakah sudah tepat sasaran (*goal attainment*), tepat proses (*process accuracy*), dan tepat dampak (*impact validity*). Oleh karena itu, evaluasi bukan sekadar kegiatan administratif untuk memenuhi kewajiban formal, melainkan merupakan proses epistemologis yang berorientasi pada pembelajaran kebijakan (*policy learning*) dan akuntabilitas publik (Weiss, 2020).

Dalam konteks pemerintahan modern yang berbasis *good governance*, evaluasi kebijakan memiliki dua fungsi strategis utama: pertama, memastikan akuntabilitas pemerintah terhadap publik; kedua, menyediakan pengetahuan berbasis bukti (*evidence-based knowledge*) yang menjadi dasar perumusan kebijakan berikutnya (Patton, 2020; Ruiz-Coupeau et al., 2025). Fungsi akuntabilitas menekankan pada transparansi dan tanggung jawab publik atas hasil kebijakan, sementara fungsi pembelajaran menekankan kemampuan sistem pemerintahan untuk beradaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Sebagaimana ditegaskan oleh Weiss (2020), evaluasi kebijakan tidak hanya menjawab

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I. F., & Fazri, A. N. (2025). Evaluation of the Village Asset Management System (SIPADES) Policy in the Village Government of Larangan. Proceedings of ICOSSH 2025. <https://proceedings.antispublisher.org/index.php/icossh/article/view/523>
- Ait-El-Caid, H. (2025). Exploring the effects of integration policy on the inclusion of non-EU immigrants in European cities. Corvinus University of Budapest. <https://phd.lib.uni-corvinus.hu/1478/>
- Areu-Rangel, O. S., et al. (2025). Multicriteria evaluation of green infrastructure for public spaces in urban areas: Hydrological functionality and ecosystem services. Environmental Management. <https://link.springer.com/article/10.1007/s00267-025-02287-y>
- Azwar, A., & Usman, A. H. (2025). Artificial intelligence in public finance: A bibliometric exploration. Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas, 11(2). <https://ideas.repec.org/a/bsa/jtaken/v11y2025i2id2059.html>
- Biggs, J., & Tang, C. (2020). Teaching for Quality Learning at University (5th ed.). McGraw-Hill Education. <https://www.mheducation.com/highered/product/teaching-quality-learning-university-biggs-tang/M9780335242757.html>
- Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Longman. <https://archive.org/details/taxonomyofeducat1956bloo>
- Brik, A. B. (2025). The Institutionalization of Evaluation in the Middle East and North Africa. Edward Elgar Publishing. <https://www.elgaronline.com/abstract/book/9781035359820/chapter1.xml>
- Cayolla, R. R., Trendafilova, S., & Daddi, T. (2025). Rethinking sports: Climate change and sports events adaptations. Frontiers in Sports and Active Living. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fspor.2025.1706627/full>

- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Routledge. <https://www.routledge.com/Public-Policy-Analysis/Dunn/p/book/9780367260771>
- Engdawork, K., Nahar, P., & Davey, G. (2025). The role of NGOs in mainstreaming services for podoconiosis. University of Sussex. Open Access: https://sussex.figshare.com/articles/journal_contribution/30256186
- Engdawork, K., Nahar, P., & Davey, G. (2025). The role of NGOs in mainstreaming services for podoconiosis. University of Sussex. https://sussex.figshare.com/articles/journal_contribution/30256186
- Fauziah, B. N. H., & Untari, D. W. (2025). Communication strategy in disseminating agricultural innovation through Instagram. *Jurnal PPI Belanda*. <https://jurnal.ppibelanda.org/index.php/jppib/article/view/72>
- Gan, H., Huang, Y., Zhao, Z., & Liu, J. (2025). Green space perception and utilization in times of pandemic. *Ecological Indicators*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X25011331>
- Gupta, P., et al. (2025). Measuring the impact of vaccination policy using quasi-experimental design. *Health Policy and Planning*. <https://academic.oup.com/heapol/article/40/5/503/7708742>
- Huerta Molina, B. C. (2025). Política local de seguridad ciudadana para enfrentar la violencia intrafamiliar. University of Chile Repository. <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/206953>
- Liu, X., Gu, L., & Zou, L. (2025). Evaluation index system for the health vulnerability of frail older persons. *BMC Public Health*. <https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-025-24607-x>
- Mahdian, K. R., & Mandajin, R. (2025). Design of a Knowledge Management Model for Leveraging Evaluative Data Generated by Regulatory Bodies. *Journal of Public Administration*. https://journals.ut.ac.ir/article_101651_58bdc3ccab4b4487d8f37b0b1df252c5.pdf

- Mahdian, K. R., & Mandajin, R. (2025). Design of a Knowledge Management Model for Leveraging Evaluative Data. *Journal of Public Administration*.
https://journals.ut.ac.ir/article_101651_58bdc3ccab4b4487d8f37b0b1df252c5.pdf
- Matlala, L. S. (2025). Barriers to the Institutionalisation of Outcome-Based Approaches in South Africa's Public Sector. *Africa's Public Service Delivery and Performance Review*.
<https://apsdpr.org/index.php/apsdpr/article/view/939>
- Mhaibes, H. A. (2025). E-Governance in Public Institutions: Accountability and digital policy evaluation. *Journal of Economics and Administrative Sciences*.
<https://www.jeasiq.uobaghdad.edu.iq/index.php/JEASIQ/article/view/3708>
- Moyo, T. P. (2025). An Evaluation of E-Waste Management Practices in North West District Municipalities, South Africa. *University of Johannesburg Repository*.
<https://ujcontent.uj.ac.za/esploro/outputs/graduate/9957404707691>
- OECD. (2022). *OECD Policy Evaluation Framework*. Paris: OECD Publishing.
<https://www.oecd.org/governance/policy-evaluation-framework.htm>
- Patton, M. Q. (2020). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). Sage Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-research-evaluation-methods/book232962>
- Pei, X., Shi, G., Zhou, L., & Li, J. (2025). Returning grazing land to grassland policy: Ecological, economic, and social benefits assessment. *Journal of Environmental Management*.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479725033900>
- Penteado, B. E., Fornazin, M., Castro, L., & Rachid, R. R. (2025). The Implications of Artificial Intelligence in Clinical Healthcare: A Scoping Review on Regulatory Challenges. *Health and Technology*.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s12553-025-01015-0>

- Ruiz-Coupeau, S., Fondevila, G., & van Helden, G. J. (2025). Evolving performance management systems in public sector networks. *Open Research Europe*, 5(286). <https://open-research-europe.ec.europa.eu/articles/5-286>
- Shukhnin, A., & Borovyk, L. (2025). Principles of the Legal Regime of Budget Funds in the Context of Sound Public Financial Management. *Baltic Journal of Economic Studies*. <http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/3014>
- Sinaga, M., & Fujiati, F. (2025). Designing a stunting prediction model using machine learning to support SDGs in Indonesia. *Sinkron Journal*. <https://www.jurnal.polgan.ac.id/index.php/sinkron/article/view/15296>
- Streppel, Y. J. M. B. K. (2025). Beyond the Black Box: Rethinking Understanding and Accountability. Eindhoven University of Technology. <https://research.tue.nl/en/publications/beyond-the-black-box>
- Vedung, E. (2021). *Public Policy and Program Evaluation*. Transaction Publishers. <https://www.routledge.com/Public-Policy-and-Program-Evaluation/Vedung/p/book/9781138337093>
- Veeravalli, S. G. (2025). Satellite monitoring for post-clearance accountability: Lessons from Rushikonda Hill redevelopment. *Discover Cities*. Springer. <https://link.springer.com/article/10.1007/s44327-025-00130-x>
- Vollans, A. (2025). An alternative to the narrative of burnout in social work: Or, how a couple of us stay alive in this work. *Social Work, Practice and Theory*. <https://openjournals.library.sydney.edu.au/SWPS/article/view/21108>
- Weiss, C. H. (2020). *Evaluation: Methods for Studying Programs and Policies*. Prentice Hall. <https://archive.org/details/evaluationmethods>

- Wicahyo, A. (2025). Manajemen Pelayanan Publik Program Padat Karya pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Seminar Nasional Manajemen, Universitas Negeri Surabaya. <https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/senima/article/view/5422>
- Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods. Sage Publications.
- Zovko, L. (2025). Digitalisation in Health Systems in the European Union. University of Zagreb Repository. <https://zir.nsk.hr/islandora/object/efzg:15815>



DASAR-DASAR KEBIJAKAN PUBLIK (TEORI, KONSEP & PRAKTIK)

BAB 10: ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

Dr. Wydha Mustika Maharani, S.AP., M.AP
Administrasi Negara, FISIP- Universitas Jember

BAB 10

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Analisis kebijakan merupakan kegiatan yang menggabungkan aspek teoritis dan praktis untuk membantu pemerintah, lembaga publik, atau organisasi dalam memahami, merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi kebijakan publik. Masalah-masalah publik kini semakin kompleks, bersifat lintas sektor dan berskala global seperti ketimpangan sosial, perubahan iklim, disrupsi teknologi, dan migrasi sehingga pendekatan analisis kebijakan harus bersifat multidisiplin, mengintegrasikan ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat serta pemahaman terhadap sejarah, hukum, antropologi dan geografi.

Dunn (2018) menyatakan bahwa analisis kebijakan adalah proses sistematis yang menggunakan pengetahuan dan metode ilmiah untuk menjawab pertanyaan-kebijakan publik, serta berada dalam seluruh siklus kebijakan (perumusan, implementasi, evaluasi). Kerangka ini menggarisbawahi pentingnya penguasaan metode dan konteks agar hasil analisis menjadi relevan. Sementara itu, Dye (2017) menyebut bahwa kebijakan publik adalah “apa pun yang dipilih oleh pemerintahan untuk dilakukan atau tidak dilakukan”, sehingga ruang kebijakan sangat luas dan analisis yang dilakukan harus mempertimbangkan baik tindakan maupun non-tindakan pemerintah.

Literatur terkini memperkuat bahwa pendekatan multidisiplin bukan saja pilihan norma tetapi juga pilihan empiris. Sebuah studi bibliometrik menunjukkan bahwa publikasi penelitian kebijakan yang menggabungkan banyak disiplin memiliki potensi pengaruh kebijakan yang lebih tinggi (Suandi, 2024). Hal ini mendukung gagasan bahwa analisis kebijakan harus mampu mengintegrasikan perspektif berbeda dan menggunakan metode kuantitatif maupun kualitatif untuk menghadapi konteks kebijakan yang dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2014). *Public Policymaking* (8th ed.). Cengage Learning.
- Dartanto, T., & Nurkholis, A. (2021). *Energy Subsidy Reform in Indonesia: Welfare Implications and Lessons Learned*. *Energy Policy Journal*, 154(3), 112–130.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy* (15th ed.). Pearson Education.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2020). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems* (4th ed.). Oxford University Press.
- Jones, C. O. (1996). *An Introduction to the Study of Public Policy* (3rd ed.). Duxbury Press.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022). *Evaluasi Pelaksanaan Program Indonesia Pintar*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kurniawan, D., Setiawan, H., & Wicaksono, A. (2022). *Evaluating the Effectiveness of Indonesia's National Health Insurance: Policy Learning and Institutional Reform*. *Journal of Asian Public Policy*, 15(4), 567–589.
- Lasswell, H. D. (1951). *The Policy Orientation*. Stanford University Press.
- Parsons, W. (2001). *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
- Patton, C. V., & Sawicki, D. S. (1993). *Basic methods of policy analysis and planning* (2nd ed.). Prentice-Hall.
- Peters, B. G. (2019). *Institutional Theory in Political Science: The New Institutionalism* (4th ed.). Edward Elgar.
- Santoso, M. (2021). *Policy Process and Public Participation in the Omnibus Law: A Democratic Deficit in Indonesia*. *Policy Studies*, 42(5), 645–660.
- Suandi, S. (2024). *A Bibliometric Analysis of Public Policy Research Trends 2013–2023: Social and Institutional Implications*. *Indonesian Journal of Policy Studies*, 12(1), 45–67.
- World Bank. (2015). *Indonesia: Fuel Subsidy Reform*. Washington, DC: World Bank.

World Bank. (2021). *Stunting Reduction in Indonesia: Policy Integration and Implementation*. Washington, DC: World Bank.

World Bank. (2022). *Indonesia: COVID-19 Response and Economic Recovery*. Washington, DC: World Bank.



DASAR-DASAR KEBIJAKAN PUBLIK (TEORI, KONSEP & PRAKTIK)

BAB 11: KEBIJAKAN PUBLIK DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

¹Dr. Ida Ayu Putu Sri Widnyani, S.Sos., M.AP.

²Ida Ayu Githa Girindra, S.AP., M.AP.

¹Universitas Ngurah Rai & ²Universitas Udayana

BAB 11

KEBIJAKAN PUBLIK DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

A. PENDAHULUAN

Kebijakan publik memiliki peran fundamental dalam mengatur bagaimana negara menjalankan fungsi-fungsinya untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, kebijakan publik tidak lagi dipandang sebagai aktivitas yang bersifat *top-down* dan tertutup, melainkan suatu proses yang menuntut adanya prinsip keterbukaan, akuntabilitas, kolaborasi, dan responsivitas terhadap kebutuhan publik. Reformasi birokrasi dan demokratisasi telah mendorong pemerintah untuk menerapkan prinsip *good governance*, yaitu tata kelola yang baik, bersih, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan menjadi sangat penting, mengingat keberhasilan kebijakan sering kali ditentukan oleh kualitas tata kelola tersebut.

Dalam bab ini akan dibahas empat aspek utama dalam tata kelola pemerintahan yang menjadi fondasi implementasi kebijakan publik yang efektif, yaitu: (1) prinsip *good governance*, (2) transparansi, akuntabilitas, dan integritas, (3) partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, serta (4) kolaborasi multi-aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keempat aspek tersebut menjadi prasyarat terciptanya kebijakan yang tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga legitimit dan berkelanjutan.

B. PRINSIP GOOD GOVERNANCE

Konsep *good governance* berkembang sebagai respon terhadap kebutuhan reformasi penyelenggaraan pemerintahan, terutama di negara-negara yang menghadapi masalah birokrasi yang tidak efisien, korupsi, dan rendahnya kepercayaan publik. *Good governance* secara umum dipahami

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Arnstein, S. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Behn, R. (2001). *Rethinking Democratic Accountability*. Brookings Institution Press.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative Governance Regimes*. Georgetown University Press.
- Farazmand, A. (2004). *Sound Governance: Policy and Administrative Innovations*. Praeger.
- Hood, C. (2006). *Transparency in Historical Perspective*. In Hood & Heald (Eds.), *Transparency: The Key to Better Governance?* Oxford University Press.
- Huberts, L. (2018). *Integrity: What it is and why it is important*. *Public Integrity*, 20(sup1), S18–S32.
- Irvin, R. A., & Stansbury, J. (2004). Citizen participation in decision making: Is it worth the effort? *Public Administration Review*, 64(1), 55–65.
- Pateman, C. (1970). *Participation and Democratic Theory*. Cambridge University Press.
- Pierre, J., & Peters, B. G. (2000). *Governance, Politics and the State*. Macmillan.
- Rosenbloom, D. (2015). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*. McGraw-Hill.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. UNDP Policy Document.
- Widnyani, Ida Ayu Putu Sri. (2025), *Transformasi Perencanaan Pembangunan Melalui Mekanisme Musyawarah Desa*. Deepublish.



DASAR-DASAR KEBIJAKAN PUBLIK (TEORI, KONSEP & PRAKTIK)

BAB 12: KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA DAN PROSPEKNYA

BAB 12

KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA DAN PROSPEKNYA

A. SEJARAH PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA

Kebijakan publik di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan dinamis, yang mencerminkan perubahan sosial, politik, dan ekonomi negara ini. Sejak masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan, kebijakan publik telah mengalami transformasi yang signifikan. Periode-periode tersebut—mulai dari masa kolonial, kemerdekaan, Orde Baru, hingga masa Reformasi—menunjukkan perkembangan yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Pembangunan nasional, distribusi kekuasaan, serta kebijakan yang lebih demokratis pasca-reformasi, menjadi langkah signifikan yang diambil untuk merespons kebutuhan masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan (Saputra, 2016; Nugroho, 2019).

1. Masa Kolonial (Hingga 1945)

Selama masa penjajahan Belanda, kebijakan publik lebih banyak berfokus pada kepentingan penjajah, dengan sedikit perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Kebijakan yang diterapkan pada saat itu, seperti kebijakan tanam paksa dan sistem gulik, berfokus pada pengolahan sumber daya alam dan tenaga kerja, sementara sedikit memperhatikan kebutuhan pendidikan atau kesehatan rakyat Indonesia (Saputra, 2016; Wibowo, 2018). Kebijakan publik masa ini untuk kepentingan penjajah.

2. Masa Kemerdekaan (1945–1965)

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, kebijakan publik mulai diarahkan untuk pembangunan nasional dan pembentukan struktur negara yang stabil. Pemerintah mulai merumuskan kebijakan untuk memulihkan ekonomi yang hancur akibat perang dan menciptakan sistem pendidikan serta sistem kesehatan yang lebih baik (Rahardjo,

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, B. (2021). Partisipasi Publik dalam Pengambilan Kebijakan di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Ilmu Sosial*, 18(3), 67-78.
- Bappenas. (2020). *Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Ginting, M. (2021). *Kebijakan Kesehatan Nasional: Implementasi dan Evaluasi JKN*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Harahap, A. (2020). Reformasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Dari Orde Baru hingga Era Reformasi. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 23(1), 45-56.
- https://ugm.ac.id/id/berita/100-hari-pemerintahan-prabowo-gibran-pakar-ugm-nilai-masih-minim-kejelasan-perencanaan-dan-eksekusi/?utm_source=chatgpt.com "100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pakar UGM Nilai ..."
- https://ugm.ac.id/id/berita/pukat-ugm-soroti-komitmen-pemerintahan-prabowo-gibran-dalam-upaya-pemberantasan-korupsi/?utm_source=chatgpt.com "Pukat UGM Soroti Komitmen Pemerintahan Prabowo ..."
- Jati, S. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan Berbasis Kompetensi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 22(4), 134-144.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Kebijakan Fiskal untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Laporan Tahunan: Pemberantasan Korupsi dan Transparansi Pemerintahan*. Jakarta: KPK.
- LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). (2017). *Dampak Globalisasi terhadap Kebijakan Publik di Indonesia*. Jakarta: LIPI.
- Nugroho, R. (2019). *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Indonesia: Dari Reformasi hingga Globalisasi*. Jakarta: Gramedia.
- Rahardjo, M. (2017). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rofiqul, A. (2018). *Kebijakan Sosial di Indonesia: Arah dan Perkembangan*. Jakarta: Penerbit Sosial.

- Saputra, R. (2016). *Kebijakan Publik di Indonesia: Sejarah, Implementasi, dan Tantangannya*. Jakarta: Penerbit Buku Ilmiah.
- Suryadinata, L. (2021). *Politik dan Kebijakan Publik Indonesia: Perspektif Global dan Lokal*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Susanto, R. (2017). *Kebijakan Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Penerbit Buku Ekonomi.
- Sutrisno, B. (2020). Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Konteks Kebijakan Publik Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 30-44.
- Suwito, Y. (2020). Peran Teknologi dalam Transformasi Kebijakan Publik Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Inovasi*, 17(3), 60-75.
- Tan, A. (2022). Kebijakan Lingkungan Indonesia dan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim. *Jurnal Lingkungan*, 19(2), 102-115.
- Tanjung, M. (2021). *SDGs dan Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Kebijakan Publik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit SDGs Indonesia.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2020). *Sustainable Development Goals in Indonesia*. Jakarta: UNDP Indonesia.
- Wibowo, A. (2018). Transformasi Kebijakan Publik Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Pemerintahan*, 15(2), 110-120.

PROFIL PENULIS



Dr. Restu Widyo Sasongko, S.Pd., M.Si. lahir di Klaten Jawa Tengah pada tahun 1975. Selepas lulus dari FKIP UNINUS tahun 2005, melanjutkan studi pada Program Pascasarjana UNIGA dan menyelesaikan program magister (S2) tahun 2007. Pada tahun 2022, meraih gelar doktor (S3) dari Program Pascasarjana UNPAS.

Selain itu, juga mengikuti berbagai pendidikan non-formal, di antaranya Diklat PIM IV (2008), Diklat Bendahara Pengeluaran (2010), Diklat Pengadaan Barang dan Jasa (2011), Diklat Asessor Kompetensi Pemerintahan (2015), dan Sertifikasi Dosen (2020). Sejak tahun 1996 mengabdikan pada Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) dan dari tahun 2018 hingga sekarang menjadi dosen tetap pada Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN.



Syahrabudin Husein Enala, S.Sos., M.A.P. Seorang dosen tetap Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Musamus Merauke. Lahir di Pasarwajo, 19 Februari 1992. Penulis merupakan anak Pertama dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Husein Djaila dan Ibu Wa Saa. Penulis Memiliki Seorang Istri Wa Lina, S.Pd. dan tiga orang anak perempuan; anak pertama Syahira Azzahra Syahrabudin Husen Inali,

anak kedua Syahwa Silmi Kaffah Syahrabudin dan anak ketiga Syaquillah Humairah Syahrabudin. Penulis menyelesaikan Pendidikan program Sarjana (S1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Halu Oleo Kendari pada tahun 2015 dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Halu Oleo Kendari Program Studi Administrasi Pembangunan pada tahun 2017. Buku yang telah ditulis dan terbit berjudul di antaranya: *Administrasi Kepegawaian (2023)*, *Sebuah Pengantar Memahami Ekonomi Politik (2024)*, [*Pendidikan Anti Korupsi \(2024\)*](#), [*Transformasi Kepemimpinan \(Membangun Organisasi Melalui Visi, Kompetensi dan Etika \(2024\)*](#), [*Administrasi negara : prinsip dan praktik*](#)

(2024), *Manajemen Administrasi Publik* (2025), *Sistem Pemerintahan Daerah* (2025), dan *Statistika Terapan (Alat Kunci dalam Ekonomi dan Bisnis)* (2025).



Dr. Nur Jalal, M.Si. merupakan seorang dosen tetap di Universitas Musamus Merauke, dengan jabatan fungsional Lektor (III/c) dan NIDN 1201016501. lahir di Pinrang, 31 Desember 1965, dan saat ini berdomisili di Jalan Kamizaun, Mopah Lama, Merauke, Papua Selatan. Dalam menjalankan tugas akademiknya, nomor telepon 081248011987 atau melalui email resmi nurjalal@unmus.ac.id menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di IAIN Alauddin Makassar pada tahun 1990, dengan bidang ilmu Pendidikan Agama Islam. Pada jenjang magister (S2), melanjutkan studi di Universitas Hasanuddin Makassar, mengambil bidang Sosiologi, dan lulus pada tahun 2010 dengan tesis berjudul *Perempuan di Sektor Informal di Kabupaten Merauke*, di bawah bimbingan Dr. Baego, SH dan Prof. Dr. Maria Pandu, MA. Selanjutnya, meraih gelar doktor (S3) di Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2015 dengan disertasi berjudul *Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Sektor Informal di Kabupaten Merauke*. Dalam penyusunan disertasi tersebut, dibimbing oleh Prof. Dr. Muhammad Nur Sadiq, M.Si., Prof. Dr. Haselman, M.Si., dan Dr. Hj. Saribulan, M.Si.



Dr. Ida Ayu Putu Sri Widnyani, S.Sos., M.AP. lahir di Badung-Bali, 29 Juni. Setelah menyelesaikan Pendidikan Sarjana Administrasi Negara FISIP UNWAR tahun 1997, Pendidikan S2 Magister Administrasi Publik Di Pascasarjana Universitas Ngurah Rai tahun 2011 dan Pada Tahun 2015 menyelesaikan Program Doktor Ilmu Administrasi dengan kekhususan Administrasi Publik di FIA Universitas Brawijaya-Malang. Sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang sebagai Dosen dpk LLDIKTI Wilayah VIII di S1 & S2 Administrasi Publik Universitas Ngurah Rai, saat ini sebagai Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik

Pascasarjana Universitas Ngurah Rai-Denpasar. Pernah sebagai Komisioner KPU Kabupaten Badung, Sebagai Ketua DPD IAPA (Indonesian Association for Public Administration) Bali Nusra dan sebagai Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Badung sampai dengan sekarang. Pengalaman penelitian yang pernah dilakukan dan publikasi di beberapa jurnal ilmiah, prosiding nasional dan internasional tentang Pemilihan, Perencanaan Pembangunan, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik. Buku yang pernah diterbitkan, menulis di book chapter termasuk sebagai editor”. Aktif sebagai narasumber dalam forum ilmiah, narasumber bimbingan teknis DPRD, Tim Juri Lomba karya Tulis, Panelis Debat Publik Pilkada, Moderator, Tim Perumus, Sebagai Tim Advokasi Kebijakan, Pandu Digital Bacth Merah, sebagai reviewer di beberapa jurnal ilmiah lokal dan nasional, Konsultan Nasional Penyusunan Evaluasi Kebijakan SP4N LAPOR! Sampai saat ini sebagai Konsultan Kebijakan Publik, sebagai Asesor Analisis Kebijakan Publik.



Frederikus Antonius Mana, S.Fil., MPA lahir di Nagekeo Flores pada 21 September 1987 anak kedua dari lima bersaudara. Menamatkan pendidikan SD pada SDK Penginanga Tahun 1999, melanjutkan pendidikan SLTP-SLTA pada SLTP-SLTA Seminari Menengah Sinar Buana Sumba Barat Daya dan lulus pada tahun 2005, kemudian melanjutkan pendidikan

S1 pada Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan lulus pada Tahun 2013. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan S2 pada Magister Administrasi Publik FISIPOL Universitas Gadjah Mada dan lulus pada Tahun 2016. Sejak tahun 2022 dan sampai saat ini menjadi dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Musamus Merauke. Buku yang telah ditulis dan terbit berjudul di antaranya: *Administrasi Kepegawaian, Kepemimpinan Publik, Pengantar Ilmu Administrasi Publik*.



Dr. Dina Suryawati, S.Sos., M.AP adalah seorang dosen dan peneliti di bidang administrasi publik pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Gelar Magister diperoleh dari Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), Universitas Brawijaya. Demikian pula, gelar doktor juga diperoleh dari Program Studi Doktor Ilmu Administrasi (PSDIA) FIA Universitas Brawijaya. Spesialisasi utamanya sebagai dosen adalah pada bidang ilmu Pemerintahan Daerah. Namun demikian riset yang telah dilakukan selain bidang utama pemerintah daerah juga meliputi bidang kajian kebijakan publik dan keuangan public dengan Pemerintah Daerah sebagai lokus penelitian.



Jalu Sora Wicitra, S.AP., M.AP. adalah dosen pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Balitar (Unisba) Blitar. Beliau menyelesaikan pendidikan Magister Administrasi Publik dan memiliki minat kajian di bidang kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, serta inovasi sektor publik. Selain aktif mengajar mata kuliah seperti *Pengambilan Keputusan dalam Kebijakan Publik* dan *Manajemen Pemerintahan Daerah*, beliau juga terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berfokus pada perumusan kebijakan berbasis bukti dan penguatan kapasitas birokrasi daerah. Tulisan-tulisannya berupaya menjembatani teori kebijakan publik dengan praktik pemerintahan di Indonesia, khususnya pada level lokal.

Email: jaluforwork@gmail.com



Yaen Miftakhul Laily, M.AP berprofesi sebagai dosen di Universitas Jember, dengan minat keilmuan yang berfokus pada administrasi publik dan kebijakan publik. Semasa menempuh pendidikan magister, Yaen aktif mengikuti berbagai program hibah penelitian, yang memperkuat komitmennya dalam pengembangan ilmu pengetahuan berbasis riset.



Daelami Ahmad, S.Ag, M.Si. lahir di Banyuwangi pada tanggal 10 Juli 1974. Tinggal di Kota Serang Provinsi Banten. Lulus S1 Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1998 dan Lulus S2 Magister Ilmu Administrasi di STIA YAPPAN Jakarta pada tahun 2011. Lulus Suscadoswar (Kursus Calon Dosen Pendidikan Kewarganegaraan) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada tahun 2000. Dosen Tetap Prodi Ilmu Administrasi Bisnis di Institut Kemandirian Nusantara (IKNUS) Pandeglang Banten, mengampu MK Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila, Kewirausahaan, Manajemen SDM, Kebijakan Publik, Etika Administrasi, Kepemimpinan, dan Personality Development. Saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Umum, dan Humas Universitas Salakanagara Tangerang dan Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Mandiri Cileles Lebak Banten. Pernah menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten (2001-2013), Wakil Direktur Akademi Akuntansi Keuangan dan Perbankan Indonesia (2013-2016), Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ichsan Medical Centre Bintaro (2016-2021), Direktur LKP Ichsan Medical Centre (2016-2021), dan Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Caregiver (2017-2021). Aktif sebagai pengurus di organisasi Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Banten (2009-2022), Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (BAPOMI) Provinsi Banten, dan APPERTI (Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi) Banten, dan Pendiri dan Wakil Ketua APVOKASI (Aliansi Pendidikan Vokasi Seluruh Indonesia).



Dr. Imanuddin Hasbi, S.T., M.M. sebagai seorang akademisi dan penulis yang memiliki keahlian di bidang manajemen, pemasaran, dan pendidikan. Berikut adalah profil singkatnya berdasarkan informasi yang tersedia: **Pendidikan yang ditempuh** Sarjana Teknik dan Manajemen Industri dari Universitas Pasundan, Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Bandung, dan Doktor Manajemen Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia. **Keahlian** di bidang Manajemen Pemasaran, Kewirausahaan, Administrasi, Pendidikan, dan Manajemen **Afiliasi** Dosen di Program Studi S1 Administrasi Bisnis, Telkom University. **Publikasi dan Kontribusi** memiliki publikasi ilmiah yang terindeks di Google Scholar dan SINTA dan Banyak Kutipan karya ilmiah di google scholar. **Minat Penelitian** seperti Perilaku konsumen, Manajemen penjualan, Manajemen ritel, dan Intelijen kompetitif. Dari informasi yang tersedia, Imanuddin Hasbi aktif dalam bidang pendidikan dan penelitian, dengan fokus pada manajemen dan pemasaran.



Dr. Ida Ayu Putu Sri Widnyani, S.Sos., M.AP adalah seorang dosen di Universitas Udayana yang memiliki keahlian di bidang *governance* dan perencanaan pembangunan. Lahir pada 28 Februari 2000, ia menempuh pendidikan S1 dan S2 di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, di mana ia mendalami tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, serta strategi pembangunan berkelanjutan.

Sebagai akademisi, ia aktif dalam penelitian, pengajaran, serta pengabdian kepada masyarakat, dengan fokus pada penerapan tata kelola yang efektif dalam sektor pemerintahan dan pembangunan. Melalui karya ilmiah dan diskusi akademik, ia berupaya memberikan kontribusi dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, inovatif, dan berbasis data. Dedikasinya dalam dunia pendidikan dan penelitian menjadikannya salah satu akademisi muda yang berkomitmen dalam pengembangan ilmu administrasi dan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.



Dr. Wydha Mustika Maharani, S.AP., M.AP., lahir di Blitar pada 7 November 1990. Penulis menyelesaikan Sarjana Administrasi Publik di Universitas Brawijaya pada 2013, diikuti dengan Magister Administrasi Publik dari Universitas Merdeka Malang pada 2016, dan meraih Doktor Ilmu Administrasi di Universitas Brawijaya pada 2023. Penulis memulai karier akademiknya sebagai dosen di Universitas Islam Balitar pada 2017, dan sejak 2025 mengajar di Universitas Jember. Fokus penulis adalah di bidang administrasi publik, baik dalam pengajaran maupun penelitian. Penelitian penulis banyak dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dengan topik kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan. Melalui buku ini, penulis berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam administrasi publik dengan tujuan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan administrasi publik di Indonesia.

DASAR – DASAR KEBIJAKAN PUBLIK

(Teori, Konsep & Praktik)

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Kebijakan publik bertujuan untuk menciptakan keteraturan, kesejahteraan, dan keadilan sosial dalam kehidupan bernegara. Dasar-dasar kebijakan publik menjadi pedoman penting agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan dapat dilaksanakan secara efektif.

Dasar pertama kebijakan publik adalah kepentingan umum. Setiap kebijakan harus mengutamakan kebutuhan masyarakat luas, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pemerintah wajib memastikan bahwa kebijakan yang dibuat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

Dasar kedua adalah landasan hukum. Kebijakan publik harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Landasan hukum juga mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kebijakan.

Dasar ketiga adalah nilai dan etika. Kebijakan publik harus berlandaskan nilai keadilan, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Nilai-nilai etis ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih.

Dasar keempat adalah partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan membantu pemerintah memahami permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Partisipasi publik juga membuat kebijakan lebih demokratis dan mudah diterima oleh masyarakat.

Dasar kelima adalah efektivitas dan efisiensi. Kebijakan publik harus mampu mencapai tujuan yang diharapkan dengan penggunaan sumber daya yang optimal, baik dari segi waktu, biaya, maupun tenaga. Kebijakan yang efektif dan efisien akan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

Dengan memahami dasar-dasar kebijakan publik, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.



SCANME

 www.penerbitwidina.com
 [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)
 [penerbit widina](https://www.facebook.com/penerbitwidina)
 penerbitwidina@gmail.com
 [widina store](#)
 [widina bookstore](#)

Layanan Pembaca & Penitipan Buku
0815-7000-699

Hukum & Pemerintahan

ISBN 978-634-246-624-7



9

786342

466247